

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar utama dalam struktur perekonomian nasional. UMKM didefinisikan sebagai kegiatan usaha produktif yang dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha. Selain itu, UMKM juga dapat dipahami sebagai aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.²

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan perekonomian nasional yang seimbang, berkelanjutan dan berkeadilan. Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, UMKM juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan penguatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan UMKM tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada peningkatan kemandirian pelaku usaha agar mampu bersaing secara berkelanjutan.³

Meskipun memiliki peran yang sangat penting UMKM masih dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti keterbatasan pengetahuan dan keterampilan SDM, keterbatasan modal usaha, kemampuan teknologi yang minim,

² Titik Purwanti, *UMKM Membangun Ekonomi Kreatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 12.

³ Halida Zia, "Pengaturan Pengembangan UMKM di Indonesia", *RIO Law Jurnal* Vol 1, No. 1 (2020), 1.

kemampuan organisasi dan manajemen yang belum optimal serta kemampuan strategi pemasaran yang minim.⁴ Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk memberdayakan UMKM guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁵

Dalam upaya mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pasal 1 mendefinisikan pemberdayaan sebagai inisiatif kolaboratif antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang kondusif sehingga UMKM dapat berkembang menjadi usaha yang kuat dan mandiri⁶. Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut, UMKM perlu diberdayakan melalui penciptaan iklim usaha yang mendukung, serta melalui pengembangan dan pembinaan yang berkelanjutan.⁷

Dalam konteks daerah, Kabupaten Blitar memiliki jumlah UMKM yang cukup besar dengan perkembangan yang fluktuatif. Selain itu, masih terdapat berbagai permasalahan seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses pemasaran dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya

⁴ Dewi Suryani Purba at.al., *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 48-50

⁵ Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziah, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen* Vol. 2 No. 2 (2014), 167.

⁶ Republik Indonesia, Undang Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bab 1, Pasal 1.

⁷ Andhita Fatikha Sari, Rizki Hegia Sampurna dan Dine Meigawati, "Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Sukabumi," *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2 No. 10 (2022), 3353.

pemberdayaan yang dilakukan belum sepenuhnya optimal, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang pemberdayaan UMKM, telah melaksanakan berbagai strategi guna mendorong terwujudnya UMKM yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Strategi tersebut diimplementasikan melalui berbagai program, antara lain pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi penguatan legalitas, kerja sama dengan berbagai mitra, serta pengembangan akses pemasaran. Namun demikian, efektivitas dari strategi pemberdayaan tersebut dalam mewujudkan kemandirian UMKM masih perlu dikaji secara lebih mendalam.⁸

Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Blitar tersebar di 22 kecamatan dan sebagian berada di bawah pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar. Strategi pemberdayaan yang dilaksanakan diharapkan mampu meningkatkan daya saing, mengatasi berbagai kendala usaha, serta mendorong kemandirian UMKM. Selain itu, pengembangan UMKM juga diharapkan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. UMKM di Kabupaten Blitar memiliki perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya yang dapat dilihat dari data berikut:

⁸ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar.

Tabel 1.1
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten
Blitar Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	UMKM 2021	UMKM 2022	UMKM 2023	UMKM 2024	UMKM 2025
1	Wonodadi	1511	1764	1094	1150	1940
2	Udanawu	1078	1608	942	978	1773
3	Srengat	2443	2619	2231	2341	2699
4	Kademangan	2219	1662	1959	2143	1994
5	Bakung	364	319	327	351	361
6	Ponggok	1755	2468	1185	1262	2700
7	Sanankulon	2334	1485	2139	2250	1606
8	Wonotirto	539	402	411	431	437
9	Nglegok	1639	2262	1438	1545	2634
10	Kanigoro	3921	1533	3792	3923	1678
11	Garum	1856	2352	1881	1974	2556
12	Sutojayan	987	1553	935	1025	2173
13	Panggungrejo	1220	220	1131	1173	76
14	Talun	1517	1541	1367	1448	1800
15	Gandusari	2487	2311	2322	2409	2536
16	Binangun	918	881	770	810	939
17	Wlingi	1076	1791	987	1034	1938
18	Doko	965	338	821	876	393
19	Kesamben	1066	1408	887	952	1692
20	Wates	318	666	209	221	778
21	Selorejo	1698	1494	1552	1607	1430
22	Selopuro	1201	795	1094	1130	972
	Total	33112	31472	29474	31033	35105

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2021-2025

Berdasarkan data tahun 2021–2025, jumlah UMKM di Kabupaten Blitar menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, dengan penurunan hingga tahun 2023 dan peningkatan kembali pada tahun 2025. Dinamika ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pendataan, kondisi geografis, perbedaan potensi wilayah, serta efektivitas program pembinaan. Selain itu, terdapat ketimpangan jumlah UMKM antar kecamatan, sehingga diperlukan kebijakan pengembangan yang lebih terarah dan berbasis potensi wilayah.

Tabel 1.2
Jumlah UMKM Kabupaten Blitar Berdasarkan Sektor Usaha
Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah UMKM	Keterangan Sektor Usaha							
			Agribisnis	Jasa	Kerajinan Tangan	Konveksi/ Fashion	Makanan dan Minum	Otomotif	Pendidikan/ Pelatihan	Bidang Lainnya
1	Wonodadi	1940	77	193	16	42	642	57	0	913
2	Udanawu	1773	115	214	6	30	554	47	1	806
3	Srengat	2699	107	346	49	53	958	74	1	1111
4	Kademangan	1994	50	257	119	70	505	52	1	940
5	Bakung	361	10	25	0	3	74	9	0	240
6	Ponggok	2700	79	325	46	51	964	80	1	1154
7	Sanankulon	1606	38	230	13	22	586	42	0	675
8	Wonotirto	437	6	26	2	8	142	8	0	245
9	Nglegok	2634	93	347	55	66	868	74	0	1131
10	Kaigoro	1678	54	168	14	31	580	64	10	757
11	Garum	2556	128	324	33	52	706	79	5	1229
12	Sutojayan	2173	45	413	32	85	546	74	3	975
13	Panggungrejo	76	1	13	0	1	14	0	0	47
14	Talun	1800	53	209	31	41	742	75	2	647
15	Gandusari	2536	90	258	52	73	707	92	0	1264
16	Binangun	939	33	85	26	36	381	24	0	354
17	Wlingi	1938	121	169	15	8	689	49	0	887
18	Doko	393	4	38	40	9	204	18	1	79
19	Kesamben	1692	42	317	19	35	394	60	0	825
20	Wates	778	25	57	17	21	157	32	1	468
21	Selorejo	1430	40	147	43	33	378	42	0	747
22	Selopuro	972	42	85	1	20	249	9	0	566
Total		35105	1253	4246	629	790	11040	1061	26	16060

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

Berdasarkan data tahun 2025, UMKM di Kabupaten Blitar berjumlah 35.105 unit dengan struktur sektor usaha yang beragam dan didominasi oleh sektor makanan dan minuman, jasa, serta usaha lainnya. Sebaran UMKM menunjukkan adanya perbedaan antar kecamatan, di mana beberapa wilayah memiliki jumlah dan variasi usaha yang tinggi, sementara wilayah lain relatif rendah dan kurang beragam. Selain itu, sektor agribisnis, otomotif, serta pendidikan dan pelatihan masih memiliki kontribusi yang terbatas. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan pengembangan UMKM yang lebih terarah untuk mendorong pemerataan dan diversifikasi usaha sesuai potensi wilayah.

Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Blitar yang cenderung fluktuatif serta beragamnya sektor usaha berdampak pada meningkatnya tingkat persaingan, khususnya dalam aspek pemasaran. Dalam kondisi tersebut, pelaku UMKM dituntut untuk mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha agar tetap bertahan dan berkembang. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, terutama sebagai penopang ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar memiliki peran strategis dalam melaksanakan pemberdayaan melalui berbagai program dan kebijakan yang telah dirancang.

Keberhasilan pemberdayaan sangat ditentukan oleh efektivitas strategi yang diterapkan, terutama melalui program pembinaan dan pelatihan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, daya saing, serta kemandirian UMKM. Namun demikian, hasil pemberdayaan yang dilakukan masih belum optimal, yang ditunjukkan oleh tingkat perkembangan UMKM yang relatif belum mampu bersaing dengan usaha skala besar. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pemberdayaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Selain itu, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, lemahnya pemasaran, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam literasi digital. Permasalahan tersebut menghambat peningkatan kapasitas dan kemandirian usaha, sehingga diperlukan langkah strategis yang lebih komprehensif dari pemerintah daerah.⁹

⁹ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar

Berbagai kendala tersebut mengindikasikan bahwa strategi pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan kemandirian UMKM. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan agar pemberdayaan yang dilakukan dapat memberikan dampak yang signifikan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memandang penting untuk mengkaji **“Strategi Pemberdayaan dalam Mewujudkan Kemandirian Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Blitar”** guna menganalisis secara komprehensif peran serta langkah strategis pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam mendorong kemandirian pelaku UMKM di Kabupaten Blitar.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari konteks penelitian di atas dapat di ketahui fokus penelitian yang ada adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mewujudkan kemandirian UMKM?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mewujudkan kemandirian UMKM?
3. Bagaimana hasil pemberdayaan dalam mewujudkan kemandirian UMKM Oleh Dinas Koperssi Usaha Kecil dan Menengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian di atas, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mewujudkan kemandirian UMKM
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mewujudkan kemandirian UMKM
3. Untuk mendeskripsikan hasil pemberdayaan dalam mewujudkan kemandirian UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mewujudkan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis bagi pembaca. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi dan manajemen publik yang berkaitan dengan strategi pemberdayaan UMKM. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dalam mewujudkan kemandirian UMKM. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi, bahan perbandingan, serta acuan bagi

penelitian selanjutnya yang mengkaji strategi pemberdayaan dan kemandirian UMKM..

2. Secara Praktis

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini Adalah sebagai berikut:

a. Bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi dinas dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan UMKM, khususnya dalam meningkatkan efektivitas evaluasi program melalui monitoring yang berkelanjutan dan berbasis data, serta memperkuat pendampingan pada aspek digitalisasi, inovasi, akses permodalan, dan pemasaran guna mendorong kemandirian UMKM yang lebih merata dan berkelanjutan.

b. Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian ilmiah terkait model pemberdayaan UMKM yang efektif, terutama yang mengintegrasikan aspek strategi, pelaksanaan, dan hasil dalam mewujudkan kemandirian UMKM.

c. Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Blitar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya memanfaatkan program pemberdayaan, serta mendorong peningkatan kemandirian melalui

inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran, dan penguatan kemampuan manajerial usaha.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji strategi pemberdayaan UMKM, khususnya dalam mengembangkan variabel, pendekatan, dan cakupan penelitian yang lebih luas guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan objektif.

E. Penegasan Istilah

1. Konseptual

a. Strategi

Strategi dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan penting yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan berbagai tindakan serta pengalokasian sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran utama. Dalam prosesnya, strategi mempertimbangkan keunggulan kompetitif, komparatif, serta sinergis yang berkelanjutan, sehingga mampu memberikan arah, ruang lingkup, dan pandangan jangka panjang yang menyeluruh bagi individu maupun organisasi¹⁰.

b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dinas ini berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah, pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM guna meningkatkan daya saing, produktivitas, dan kemandirian pelaku usaha. Selain itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga bertanggung jawab dalam menyediakan layanan administrasi, pendampingan, pelatihan, serta pemberdayaan yang berorientasi pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia

¹⁰ Triton, *Marketing Strategic*, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008), 16.

dan pengembangan pasar. Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, Dinas ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹

c. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM adalah proses peningkatan kemampuan dan kemandirian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui akses terhadap sumber daya (modal, teknologi, pasar, pemasaran), pelatihan, dan dukungan institusional, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional dan mengurangi kemiskinan¹². Pemberdayaan UMKM bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi pengangguran. Upaya ini memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis pada masyarakat menengah ke bawah serta menjadi fondasi kemandirian ekonomi bangsa. Dalam konteks Indonesia, pemberdayaan UMKM memerlukan peran bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, legislatif, lembaga keuangan, pengusaha besar, dan masyarakat¹³.

¹¹ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, “*Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*”, (2020).

¹² Kementrian koperasi dan UKM RI (2008) dalam pedoman pemberdayaan UMKM

¹³ Bustami, *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Ekonomi Islam*, (Serang: A- Empat, 2015), 34.

d. Kemandirian UMKM

Kemandirian UMKM merupakan kemampuan pelaku usaha untuk mengelola dan mengembangkan usahanya secara mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak eksternal, yang mencakup aspek pengambilan keputusan, manajemen keuangan, inovasi produk, serta pemasaran. Indikator kemandirian dapat dilihat dari kemampuan mengakses modal, mengelola risiko, berinovasi, dan memperluas pasar secara mandiri.¹⁴

e. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan maupun badan usaha dengan fokus pada sektor ekonomi kreatif serta memenuhi kriteria yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum, UMKM dapat dipahami sebagai bentuk usaha yang dijalankan dalam skala mikro atau kecil dengan cakupan kegiatan usaha yang terbatas. Keberadaan UMKM menjadi salah satu prioritas utama dalam strategi pembangunan di berbagai negara karena sektor ini memiliki kontribusi yang signifikan, tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam aspek

¹⁴ Sukirman dan Mamik Indaryani, “Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menuju Kemandirian Usaha dengan Menerapkan Manajemen Profesional” *Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang* (2014), 4.

sosial, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

2. Operasional

Strategi merupakan serangkaian langkah terencana dan sistematis yang disusun dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu. Pemberdayaan UMKM adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha melalui berbagai program, seperti pelatihan, pendampingan, fasilitasi akses permodalan, serta perluasan pasar. Adapun kemandirian UMKM mengacu pada kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan usahanya secara mandiri, termasuk dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, inovasi, dan pemasaran. Dengan demikian, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar dalam melaksanakan pemberdayaan guna mewujudkan kemandirian UMKM.

¹⁵ Muhammad Wahyudi et al., "Pelatihan Design Untuk Meningkatkan Kreativitas Promosi UMKM" *Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa* Vol. 2 No.1 (2024), 177.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan penulisan, pembahasan dan penilaian skripsi, maka dalam pembuatannya dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan penguji, pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Isi

BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan membahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi objek penelitian dan alasan diangkatnya judul tersebut, selanjutnya terdapat fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi. Dengan pendahuluan pembaca dapat mengetahui gambaran penelitian dan konsep penelitian, juga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memahami bab selanjutnya.

BAB II: Kajian Pustaka

Kajian Pustaka memuat tentang konsep atau teori yang melandasi penelitian. Dalam kajian pustaka ini di bagi menjadi enam sub bab yaitu strategi, pemberdayaan, kemandirian,

usaha mikro kecil dan menengah, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III: Metode Penelitian

Metode penelitian memuat tentang metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini meliputi rancangan penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian

Paparan hasil penelitian memuat berbagai temuan yang di peroleh setelah penelitian dilakukan. Jumlah temuan yang di uraikan harus sesuai dengan fokus dan identifikasi yang telah di tetapkan dalam masalah penelitian. Temuan temuan tersebut dapat disajikan berupa foto foto, dokumentasi atau kutipan wawancara.

BAB V: Pembahasan

Bagian pembahasan memuat uraian yang menjelaskan serta mendukung temuan penelitian dengan mengacu pada pendapat informan kredibel. Selanjutnya, temuan tersebut dianalisis dengan cara membandingkannya dengan hasil penelitian sebelumnya, serta dikaitkan dengan teori atau pandangan para ahli yang relevan. Melalui proses ini, hasil penelitian dapat

memperkuat hubungan dengan teori yang ada, atau sebaliknya menunjukkan adanya perbedaan maupun pertentangan yang memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan ilmu pengetahuan

BAB VI: Penutup

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun dalam bentuk pernyataan yang ringkas, jelas, dan tepat, yang dirangkum dari hasil penelitian serta pembahasan guna menegaskan temuan penelitian dan menjawab fokus dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Saran disusun secara operasional dan dapat dilaksanakan, serta didasarkan pada hasil penelitian yang telah diperoleh.

3. Bagian Akhir

Terdiri dari daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup